

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Pelaksanaan Pemindahtanganan (Penjualan) Barang Milik Negara oleh Seksi Pengelola Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur pelaksanaan pemindahtanganan penjualan Barang Milik Negara terdapat 3 pengelompokan dokumen yang digunakan yaitu :
 - a. Dokumen Untuk Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara
 - b. Dokumen untuk Permohonan pengajuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan
 - c. Dokumen untuk Permohonan Penilaian BMN dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Prosedur Pelaksanaan Pemindahtanganan (Penjualan) Barang Milik Negara melalui tahap persiapan permohonan penjualan Barang Milik Negara, tahap permohonan pengajuan Barang Milik Negara, tahap penilaian Barang Milik Negara.

Tahap persiapan permohonan penjualan Barang Milik Negara yaitu pihak pemohon mengumpulkan persyaratan dokumen untuk Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan menerima surat keputusan penetapan status pengguna dari Kepala KPKNL.

Tahap pelaksanaan permohonan penjualan Barang Milik Negara pada tahap ini KPKNL menerima surat permohonan penjualan barang milik negara, kemudian pihak KPKNL memproses permohonan tersebut dimulai dari penelitian kelengkapan berkas, permohonan penilaian kepada seksi pelayanan penilaian untuk menilai Barang Milik Negara kemudian disampaikan kepada Kepala KPKNL untuk menandatangani surat persetujuan penjualan Barang Milik Negara.

Tahap Penilaian yaitu tahap penilaian penjualan Barang Milik Negara oleh tim penilai KPKNL dimulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi dokumen dan menginput permohonan penilaian pada sistem informasi penilaian kemudian melakukan pelaksanaan penilaian meliputi pengumpulan data, pemantauan kelokasi, mempelajari data, merumuskan simpulan penilai dan penyusunan laporan penilaian, setelah itu menginput hasil penilaian pada aplikasi sistem informasi penilaian.

3. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara, meliputi; Adanya perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan status Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola tidak ada kejelasan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tugas akhir yang berjudul prosedur pelaksanaan pemindahtanganan (penjualan) Barang Milik Negara Oleh Seksi Pengelola Kekayaan Negara , Berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Berdasarkan dari proses penjualan Barang Milik Negara tersebut sudah sangat baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu mengadakan sosialisasi terhadap pentingnya penjualan Barang Milik Negara yang termasuk kedalam persyaratan Barang Milik Negara yang harus dijual agar pelaksanaan penjualan lebih efektif, Jika BMN yang tidak layak digunakan dapat meminimalis biaya perawatan dan memperbaiki fasilitas dengan yang baru.
2. Agar dapat menetapkan waktu yang relevan untuk melakukan penerbitan SK Penjualan Barang Milik Negara sehingga pelaksanaannya tidak terganggu oleh Penerbitan SK Penghapusan dimana penyelenggaraan kegiatan tersebut memiliki rentang waktu yang dekat dengan SK Penjualan BMN

